

BUPATI MAGELANG MINTA MILITER DAN PEMERINTAHAN DUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/TMMD-Sengkuyung-Tahap-III-TA-2023-di-Magelang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Bupati Magelang Zaenal Arifin meminta semua pihak, baik militer maupun pemerintahan dapat bersinergi mendukung pemerataan pembangunan desa,

Hal ini ia sampaikan saat memimpin Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2023 di Desa Kalibening Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Rabu (20/09/2023).

Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap III ini juga dihadiri oleh segenap jajaran Forkompimda Kabupaten Magelang, OPD terkait, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang dan Forkompimcam Dukun.

"Mari kita bersama-sama melalui penguatan sinergitas dan kolaborasi guna mendukung pemerataan pembangunan, agar desa lebih maju dan sejahtera, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Zaenal Arifin.

Program TMMD kali ini dilaksanakan mulai tanggal 20 September hingga 10 Oktober 2023 mendatang.

Pada pelaksanaannya berlokasi di Dusun Cepek, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun.

Bentuk kegiatannya berupa pembangunan fisik betonisasi jalan dengan panjang 660 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 10 cm.

Selanjutnya, program lainnya merupakan Penyuluhan Kesehatan dari OPD terkait dan penyuluhan Kamtibmas/Anti Narkoba, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dari TNI

dan Kepolisian.

"Saya berharap kegiatan TMMD seperti ini dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan secara berkelanjutan, karena selain bisa membantu mengatasi kesulitan rakyat, juga sebagai wadah atau sarana yang cukup efektif bagi TNI untuk menjaga dan memelihara silaturahmi serta komunikasi dengan rakyat," harap Zaenal Arifin.

Pada kesempatan yang sama, Dandim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto mengatakan, kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III dilakukan di wilayah rawan bencana.

"Dampak atau manfaat dari pengerjaan TMMD ini adalah salah satunya untuk jalur evakuasi dan sebagai jalur transportasi, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Letkol Inf Jarot Susanto.

Selain kegiatan fisik juga ada sasaran non fisik seperti Penyuluhan Kesehatan dari OPD terkait dan penyuluhan Kamtibmas/Anti Narkoba, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

"Harapannya kegiatan TMMD ini sengkuyung bersama masyarakat dan TNI untuk mendukung tugas dari pada Pemerintah Daerah," ungkap Jarot.

Untuk diketahui bahwa target pengerjaan jalan cor blok pada TMMD Sengkuyung Tahap III ini selama 1 bulan dan ditambah 1 unit rumah yang akan diperbaiki melalui program RTLH.

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/20/bupati-magelang-minta-militer-dan-pemerintahan-dukung-pemerataan-pembangunan-desa>, "Bupati Magelang Minta Militer dan Pemerintahan Dukung Pemerataan Pembangunan Desa", tanggal 20 September 2023.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/508365/bupati-magelang--tmmd-dukung-pemerataan-pembangunan>, "Bupati Magelang: TMMD Dukung Pemerataan Pembangunan", tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pada pelaksanaannya berlokasi di Dusun Cepek, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun. Bentuk kegiatannya berupa pembangunan fisik betonisasi jalan dengan panjang 660 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 10 cm. Selanjutnya, program lainnya merupakan Penyuluhan Kesehatan dari OPD terkait dan penyuluhan Kamtibmas/Anti Narkoba, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dari TNI dan Kepolisian. Target pengerjaan jalan cor blok pada TMMD Sengkuyung Tahap III ini selama 1 bulan dan ditambah 1 unit rumah yang akan diperbaiki melalui program RTLH.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi